

PENGARUH SWADAYA MASYARAKAT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

Mochammad Qomaruddin
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama
teknikspilunisnu@gmail.com

ABSTRACT

Society participation toward territory infrastructure was very expected in order to give an income to region government for what definitely society needed to. It began in 2007 government declared the National Program of Society Endeavoring (PNPM) that had a target purpose for prosperity and urban society autonomy through the facilitators of PNPM Mandiri who were proactive, entering a field and making dialog directly with society. Due to the important role of facilitators of PNPM Mandiri, they were demanded to be sensitive of society response. To increase society response and autonomy in participation of infrastructure development, then PNPM Urban Autonomy particularly Jepara developed an approach or a participatory development methodology for instance PRA (Participatory Rural Appraisal. This approach emphasized to the changing of attitude and behavior. By guidance and direction from PNPM Mandiri, society autonomously was able to plan, to execute, and to evaluate infrastructure development in its region. Thus, the involvement of society endeavoring was very necessarily for its development. Not only particular parties, but people could also join in and get the outcome from the development. People would be happy and satisfied with the Program of PNPM Mandiri that could give a support for a success of execution of infrastructure development

Keywords : *PNPM Mandiri, road structure, society effort*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mempunyai tujuan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perkotaan yaitu melalui tenaga fasilitator PNPM Mandiri yang bersifat pro-aktif, dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan masyarakat. .Karena memiliki peranan yang sangat penting maka fasilitator PNPM Mandiri dituntut untuk peka terhadap respon masyarakat. Untuk meningkatkan respon dan kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur maka PNPM Mandiri Perkotaan khususnya Kota Jepara mengembangkan pendekatan/metodologi pembangunan partisipatif yang salah satu di antaranya adalah PRA (Participatory Rural Appraisal). Pendekatan ini menekankan kepada perubahan sikap dan perilaku. Dengan adanya bimbingan dan arahan dari PNPM Mandiri, masyarakat dapat secara mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan swadaya masyarakat, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Sehingga masyarakat merasa bahagia dan puas dengan adanya Program PNPM Mandiri yang mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Kata kunci : *PNPM Mandiri, infrastruktur jalan, swadaya masyarakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses atau lingkup kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan pada sektor tertentu secara teratur dan mempunyai tujuan yang jelas. Pembangunan mempunyai beberapa proses yang terdiri dari proses

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengelolaan terhadap hasil pembangunan. Beberapa hal pokok yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.

2. Masih rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi sehingga masyarakat merasa pembangunan tidak memperhatikan aspirasinya.
3. Kurang optimalnya kemitraan atau sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Untuk itu pelaksanaan pembangunan diharapkan berbasis pada partisipasi masyarakat agar diperoleh kemandirian masyarakat.

Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mempunyai tujuan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perkotaan yaitu melalui tenaga fasilitator PNPM Mandiri yang bersifat pro-aktif, dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan oleh fasilitator PNPM Mandiri sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri.

Karena memiliki peranan yang sangat penting maka fasilitator PNPM Mandiri dituntut untuk peka terhadap respon masyarakat. Untuk meningkatkan respon dan kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur maka PNPM Mandiri Perkotaan khususnya Kota Jepara mengembangkan pendekatan/metodologi pembangunan partisipatif yang salah satu di antaranya adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Pendekatan ini menekankan kepada perubahan sikap dan perilaku.

Dengan metodologi tersebut diharapkan dapat merangsang keterlibatan dan kemandirian masyarakat sehingga mereka bahagia dan puas terhadap kinerja dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi bisa muncul melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dengan adanya bimbingan dan arahan dari Fasilitator PNPM Mandiri, KSM dapat secara mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Sehingga masyarakat merasa bahagia dan puas dengan adanya Program PNPM Mandiri yang mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Batasan Masalah

Dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini masih sangat luas sehingga diperlukan batasan masalah untuk membatasi penelitian ini. Penulis membatasi penelitian ini pada lingkup analisis swadaya masyarakat pada pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007-2009 di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Tahapan swadaya masyarakat yang akan diteliti yaitu swadaya dalam tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan.

Rumusan Masalah

“Seberapa besar pengaruh swadaya masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) terhadap pembangunan infrastruktur jalan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh swadaya masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

TINJAUAN PUSTAKA

PNPM Mandiri

PNPM singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian dalam pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan dana

stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan bagian dari PNPM yang dikembangkan tingkat perkotaan. Adapun Visinya adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perkotaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sedangkan misi dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi masyarakat madani masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan, harus dimampukan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapat sumberdaya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak kelompok yang selama ini mempunyai sumber kekuasaan tadi, harus mau membagikan pengetahuan, informasi, dan sumber dayanya bagi kelompok yang lain.

Metode Evaluatif Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melaksanakan evaluasi apakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, perlu dilakukan suatu penelitian. Dua metoda penelitian evaluatif yang bersifat bottom-up adalah *rapid rural appraisal* (RRA), dan *participatory rural appraisal* (PRA).

a. Metoda *Rapid Rural Appraisal* (RRA)

Metoda RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan

perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metoda RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multi disiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Menurut James Beebe (1985), metoda RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metoda ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Metoda RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; perspektif sistem, triangulasi dari pengumpulan data, pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

b. Metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metoda PRA bertujuan

menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Kritik PRA terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan "dari atas" (*top down*) dan masyarakat tinggal melaksanakan. Proses perencanaan program tidak melalui suatu 'penyajian kebutuhan' (*need assesment*) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu.

Dengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat (*bottom up*).

Metoda PRA didasarkan pada penyempurnaan dan modifikasi dari metoda AEA (*Agroecosystems Analysis*) dan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yang dilakukan oleh kalangan LSM dan peneliti yang bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Walaupun ada beberapa kesamaan antara metoda PRA dan RRA, tetapi ada perbedaan secara mendasar. Metoda RRA penekannya adalah pada kecepatannya (*rapid*) dan pengalihan informasi oleh orang luar. Sedangkan metoda PRA penekannya adalah pada partisipasi dan pemberdayaan. Menurut Robert Chambers (1995) PRA lebih cocok disebut sebagai metoda dan pendekatan-pendekatan jamak daripada metoda dan pendekatan tunggal, dan PRA adalah menu yang menyajikan daftar metoda dan teknik terbuka dan beragam.

Dengan penekanannya pada partisipasi, maka metoda PRA mempunyai prinsip-prinsip: belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informal, menghargai perbedaan dan triangulasi.

Metoda PRA dibangun berdasarkan (a) kemampuan-kemampuan masyarakat desa setempat, (b) penggunaan teknik-

teknik fasilitatif dan partisipatoris, dan (c) pemberdayaan masyarakat desa setempat dalam prosesnya (*Khan and Suryanata, 1994*).

Metoda PRA pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi 4 macam proses, yaitu:

- 1) appraisal dan perencanaan secara partisipatoris,
- 2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program secara partisipatoris,
- 3) penyelidikan berbagai topik seperti, manajemen sumber daya alam, keamanan pangan, kesehatan, dan lain-lain.
- 4) pelatihan dan orientasi untuk peneliti dan masyarakat desa.

Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa dengan yang digunakan dalam metoda RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar

Partisipasi Masyarakat

Delapan tangga partisipasi masyarakat dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi (*Arnstein, 1969: 362 – 371*). Delapan tipologi yang di maksud menurut Arstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada partisipasi atau *non participation* yang meliputi partisipasi pada tingkat *manipulation* dan *therapy*.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan yang diberikan atau *degrees of tokenism* yang meliputi partisipasi pada tingkat *informing, consultation dan placation*.
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizens power* yang meliputi partisipasi pada tingkat *partnership, delegated* dan *citizen control*.

Lebih jelasnya pengelompokkan delapan tingkat partisipasi dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 1 Delapan Tingkatan Partisipasi

Tingkatan Partisipasi	Hakekat Karakteristik Partisipasi	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1. Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Komite berstempel, tidak ada partisipasi yang tulus, dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.	Tidak ada partisipasi
2. Penyembuhan (<i>Therapy</i>)	Pemegang kekuasaan mendidik atau mengobati, tetapi pada kenyataannya lebih banyak mengubah pola pikir masyarakat.	
3. Pemberian informasi (<i>Informing</i>)	Hak-hak masyarakat dan pilihannya diidentifikasi, pemberian informasi satu arah dari penguasa kepada masyarakat, tidak ada umpan balik untuk negosiasi dari masyarakat.	Tokenism
4. Konsultasi (<i>Conculation</i>)	Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu dipakai sarannya, tidak ada jaminan kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan	
5. Perujukan (<i>Placation</i>)	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan, suara masyarakat sering tidak diperhitungkan kemampuan dan kedudukan masyarakat yang relatif lebih rendah.	
6. Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegoisasikan, ada kesepakatan bersama, ada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab.	Tingkat kekuatan masyarakat
7. Pelimpahan kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan pada rencana atau program tertentu, menjadi tawar-menawar dan bukan tekanan dari penguasa kepada masyarakat.	
8. Kontrol oleh masyarakat (<i>citizen control</i>)	Masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengatur program atau kelembagaan yang terkait dengan kepentingan mereka, memiliki kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan aspek pengelolaan, memiliki akses langsung dengan pihak luar baik birokrasi maupun sumber dana	

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Bentuk penelitian ini merupakan studi kasus pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang berjumlah 149 Ketua KSM yang berdasarkan data primer dari data rekapitulasi KSM infrastruktur PNPM MP di Kecamatan Tahunan.

Teknik pengambilan sampel

Penentuan sampel menggunakan metode *purposive random sampling* dengan

dasar pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan yang telah diadakan di desa tersebut.

Metode *Purposive Random Sampling* adalah salah satu metode sampling yang digunakan bila penelitian membutuhkan sample dengan cirri-ciri tertentu, sehingga sudah mempunyai arah yang jelas. Pada penelitian ini yang menjadi kriteria adalah lokasi yang telah melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan.

Purposive Random Sampling berarti terarah sehingga dapat diartikan sebagai metode pengambilan sampling dengan memiliki arah berdasarkan kriteria tertentu, metode ini termasuk metode *non random* sehingga mempunyai kelebihan: a) tidak diperlukan list data dari populasi, b) permasalahan yang diungkapkan merupakan masalah yang ada dilokasi.

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi, maka dalam penelitian tesis ini menggunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2004:108) sebagai berikut :

Keterangan :

N : Populasi

n : Sampel

e : Derajat kecermatan

Dalam penelitian tesis ini dengan populasi 149 KSM dan derajat kecermatan 10% artinya bahwa tingkat kecermatan studi dikategorikan cermat dengan tingkat kepercayaan 90%, maka dengan perhitungan rumus diatas didapat sampel untuk responden sebanyak 60 orang.

Penentuan Variabel dan Cara Pengukuran

Variabel yang diteliti :

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam PNPM Mandiri Perkotaan dengan swadaya masyarakat, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pembangunan infrastruktur jalan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan d tingkat KSM terdiri dari :

1) Penjajakan awal terdiri dari :

- Pengenalan program PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat.
- Pemetaan swadaya masyarakat.
- Perencanaan partisipatif masyarakat.
- Prioritas usulan kegiatan infrastruktur.

2) Pembentukan KSM :

- Rembuk masyarakat
- Identifikasi kesiapan swadaya masyarakat.
- Pembentukan panitia kegiatan beserta rencana kerja.

b. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat KSM terdiri dari :

- 1) Pengukuran lapangan sesuai kegiatan yang di prioritaskan..
- 2) Menghitung volume dan RAB / pembuatan proposal kegiatan.
- 3) Mempersiapkan swadaya / potensi yang dimiliki.
- 4) Pelatihan KSM.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan d tingkat KSM terdiri dari :

- 1) Pengelolaan SDM
- 2) Survey material yang lebih ekonomis
- 3) Metode pelaksanaan yang benar.
- 4) Kontroling mutu pekerjaan.
- 5) Evaluasi kerja.

2. Variabel terikat

Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang nilai ditentukan oleh interaksi kerja variabel-variabel bebas (*Independent Variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk menilai keberhasilan ini digunakan indicator dari peran masyarakat desa.

Cara Pengukuran Variabel :

1. Swadaya masyarakat

Untuk mengukur tingkat swadaya masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dengan program PNPM Mandiri Perkotaan pada setiap pelaksanaan kegiatan digunakan Skala Likert 1–5 dengan kriteria berikut :

1 =Swadaya masyarakat Sangat Rendah

2 =Swadaya masyarakat Rendah

3 =Swadaya masyarakat sedang

4 =Swadaya masyarakat Tinggi

5 =Swadaya masyarakat Sangat Tinggi

2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan pada PNPM Mandiri Perkotaan digunakan Skala Likert 1-5 dengan kriteria sebagai berikut :

1 = Keberhasilan Sangat Rendah

2 = Keberhasilan Rendah

3 = Keberhasilan sedang

4 = Keberhasilan Tinggi

5 = Keberhasilan Sangat Tinggi

ANALISA DATA

Analisa data dilakukan dengan menghitung rata-rata skor komponen tingkat swadaya masyarakat pada setiap tahap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat swadaya masyarakat dan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor perolehan dengan skor standar sebagai berikut.

1. Tingkat Swadaya Masyarakat

Tabel : 2. Tingkat Swasaya Masyarakat

No	Kriteria	Kisaran Skor (Skala)
1	Tingkat swadaya sangat rendah	1,0 – 1,50
2	Tingkat swadaya rendah	1,51 – 2,50
3	Tingkat swadaya sedang	2,51 – 3,50
4	Tingkat swadaya tinggi	3,51 – 4,50
5	Tingkat swadaya sangat tinggi	4,51 – 5,0

2. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Tabel : 3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

No	Kriteria	Kisaran Skor (Skala)
1	Keberhasilan sangat rendah	1,0 – 1,50
2	Keberhasilan rendah	1,51 – 2,50
3	Keberhasilan sedang	2,51 – 3,50
4	Keberhasilan tinggi	3,51 – 4,50
5	Keberhasilan sangat tinggi	4,51 – 5,0

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tingkat keberhasilan terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan, digunakan analisis regresi dan korelasi berganda.

$$\bar{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana \bar{Y} = variable terikat (keberhasilan pembangunan infratraktur jalan dengan swadaya masyarakat). a = konstanta (*intersep*). $b_1, b_2,$ dan b_3 koefisien regresi, X_i dan $X_1 =$ variable tahap persiapan, $X_2 =$ variable tahap perencanaan, dan $X_3 =$ variable tahap pelaksanaan. Nilai konstanta a, $b_1, b_2,$ dan b_3 dihitung dengan metode kuadrat terkecil (*least square method, Levin dan Rubin, 1998*).

Untuk mengetahui pengaruh serentak dan parsial variabel bebas (*independent*

variable), yaitu tahap persiapan (X_1), tahap perencanaan (X_2), dan tahap pelaksanaan (X_3), terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dengan swadaya swadaya masyarakat (Y) masing-masing digunakan analisis Varian (F-test) dan uji-t (t-test).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisa

Pada penelitian ini digunakan responden sebanyak 60 KSM yang berasal dari 10 Desa/kelurahan yang mengadakan pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP di kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

1. Swadaya Masyarakat di Kecamatan Tahunan

Tabel 4 Bobot Swadaya Masyarakat Kecamatan Tahunan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Program PNPM-MP

NO	NAMA KSM	ALAMAT	DANA			
			BLM	SWADAYA	JUMLAH	BOBOT SWADAYA A (%)
1	Sawah Kampung	Sukodono Rt 01 / 03	7.500.000	10.828.000	18.328.000	59,08%
2	Sentono	Sukodono Rt 02 / 05	2.000.000	4.250.000	6.250.000	68,00%
3	Mbakalan Klimis	sukodono Rt 01 / 02	2.250.000	6.350.000	8.600.000	73,84%
4	Rumpun Bambu	Sukodono Rt 06 / 04	8.375.000	5.425.000	13.800.000	39,31%
5	Sejahtera	Teluk Awur Rt 02 / 01	20.750.000	7.500.000	28.250.000	26,55%
6	Semangat	Teluk Awur Rt 05 / 01	14.650.000	5.000.000	19.650.000	25,45%
7	Sejahtera 1	Teluk Awur Rt 04 / 01	27.100.000	5.580.000	32.680.000	17,07%
8	Jujur 1	Teluk Awur Rt 04 / 01	26.000.000	6.251.000	32.251.000	19,38%
9	Gunung Sari	Petekeyan Rt 17 / 04	19.250.000	15.000.000	34.250.000	43,80%
10	Pandowo	Petekeyan Rt 18 / 04	30.000.000	10.787.000	40.787.000	26,45%
11	Njamas Makam	Petekeyan Rt 13 / 03	20.312.000	20.000.000	40.312.000	49,61%
12	Durian Plembang	Petekeyan Rt 14 / 03	16.854.000	10.250.000	27.104.000	37,82%

13	Nafa Unggul	Petekeyan Rt 01 / 02	9.475.000	5.000.000	14.475.000	34,54%
14	Nanas	Langon Rt 13 / 05	15.000.000	11.000.000	26.000.000	42,31%
15	Taruna Bangsa	Petekeyan Rt 09 / 02	4.143.000	3.000.000	7.143.000	42,00%
16	Gedangan Indah	Petekeyan Rt 15 / 03	8.125.000	5.000.000	13.125.000	38,10%
17	Sendang Gege	Petekeyan Rt 16 / 04	8.102.000	2.500.000	10.602.000	23,58%
18	Gandek makmur	Petekeyan Rt 11 / 03	7.000.000	2.100.000	9.100.000	23,08%
19	Sirahan Ceria	Petekeyan Rt 08 / 02	13.750.000	10.125.000	23.875.000	42,41%
20	Bendo Mandiri	Tahunan Rt 04 / 02	11.000.000	6.600.000	17.600.000	37,50%
21	Bendo Jaya	Tahunan Rt 02 / 02	15.000.000	8.400.000	23.400.000	35,90%
22	Krajan Makmur	Tahunan Rt 08 / 04	10.000.000	5.000.000	15.000.000	33,33%
23	Tendok Mandiri	Tahunan Rt 04 / 06	20.000.000	7.500.000	27.500.000	27,27%
24	Randu Top	Tahunan Rt 03 / 01	20.000.000	10.700.000	30.700.000	34,85%
25	Gerjen Mandiri	Tahunan Rt 03 / 01	8.000.000	5.700.000	13.700.000	41,61%
26	Wono Jaya	Tahunan Rt 02 / 05	10.000.000	8.700.000	18.700.000	46,52%
27	Randu Mandiri	Tahunan Rt 02 / 01	18.000.000	4.700.000	22.700.000	20,70%
28	Krajan Jaya	Tahunan Rt 07 / 08	20.000.000	18.000.000	38.000.000	47,37%
29	Makmur Jarakah	Tegalsambi Rt 12 / 02	12.000.000	5.300.000	17.300.000	30,64%
30	Joho	Langon Rt 17 / 07	15.250.000	9.700.000	24.950.000	38,88%
31	Sido dadi	Semat Rt 01 / 01	4.500.000	1.300.000	5.800.000	22,41%
32	Gatutkaca	Senenan Rt 24 / 07	12.000.000	3.600.000	15.600.000	23,08%
33	Cinta Damai	Tegalsambi Rt 01 / 01	12.000.000	10.350.000	22.350.000	46,31%
34	Cik Pekir 2	Semat Rt 02 / 01	13.050.000	6.065.000	19.115.000	31,73%
35	Gondo arum	Petekeyan Rt 11 / 03	13.750.000	11.250.000	25.000.000	45,00%
36	Bina Karya	Tegalsambi Rt 03 / 01	21.000.000	16.000.000	37.000.000	43,24%
37	Sadewo	Senenan Rt 19 / 07	17.000.000	5.100.000	22.100.000	23,08%
38	Lancarsetia	Langon Rt 01 / 01	10.000.000	3.000.000	13.000.000	23,08%
39	Restu	Tegalsambi Rt 10 / 02	4.000.000	1.650.000	5.650.000	29,20%
40	Sido asih 2	Mangunan Rt 5	15.250.000	8.000.000	23.250.000	34,41%
41	Mandiri Desa	Tegalsambi Rt 04 / 01	21.000.000	28.800.000	49.800.000	57,83%
42	Nakulo	Senenan Rt 9 / 03	6.000.000	1.800.000	7.800.000	23,08%
43	Sidho Dadi	Langon Rt 15 / 06	20.000.000	13.000.000	33.000.000	39,39%
44	Bima	Tegalsambi Rt 11 / 02	8.000.000	5.760.000	13.760.000	41,86%
45	Bimo	Senenan Rt 01 / 01	6.000.000	1.800.000	7.800.000	23,08%
46	Barokah	Demangan Rt 4 / 1	8.000.000	3.000.000	11.000.000	27,27%
47	Sido Maju	Semat Rt 01 / 01	4.500.000	2.000.000	6.500.000	30,77%
48	Sido Rukun	Semat Rt 01 / 01	4.500.000	2.295.000	6.795.000	33,77%
49	Taraman1	Mantingan Rt 1 / 1	19.500.000	8.000.000	27.500.000	29,09%
50	Kesambi	Semat Rt 01 / 01	4.500.000	2.350.000	6.850.000	34,31%
51	Syeh Subakir	Semat Rt 02 / 01	15.000.000	4.500.000	19.500.000	23,08%
52	Jagelan	Semat Rt 06 / 03	15.000.000	18.575.000	33.575.000	55,32%
53	Moro Indah	Semat Rt 07 / 03	6.000.000	1.800.000	7.800.000	23,08%
54	Pengung	Semat Rt 03 / 02	12.500.000	3.500.000	16.000.000	21,88%
55	Lestari2	Tegalsambi Rt 08 / 02	13.000.000	22.000.000	35.000.000	62,86%
56	Manggis	Langon Rt 02 / 02	12.500.000	4.500.000	17.000.000	26,47%
57	Durian	Langon Rt 06 / 03	20.000.000	23.000.000	43.000.000	53,49%
58	Gelang gemilang	Langon Rt 10 / 05	15.000.000	8.000.000	23.000.000	34,78%
59	Kramat Jaya	Langon Rt 11 / 05	15.000.000	10.000.000	25.000.000	40,00%
60	Gemilang	Langon Rt 07 / 04	15.000.000	10.300.000	25.300.000	40,71%

Dari tabel 4 terlihat bahwa bobot swadaya masyarakat di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terendah 17,02 % pada KSM Sejahtera

di desa Teluk Awur, bobot swadaya masyarakat tertinggi 73,84 % pada KSM Bakalan Klimis di desa Sukodono. Sedangkan

bobot swadaya masyarakat rata-rata kecamatan Tahunan ini 36,18 %, menunjukkan swadaya masyarakat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP.

2. Tingkat Swadaya Masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan dengan swadaya masyarakat dalam program PNPM-MP mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam penelitian ini swadaya masyarakat dinilai dari tiga tahap, yaitu :

a. Pada Tahap persiapan diukur dengan sebelas variabel yaitu :

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP dilingkungkannya.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.
- 3) Sosialisasi swadaya oleh Fasilitator.
- 4) Masyarakat mengenal permasalahan dilingkungkannya sendiri.
- 5) Perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat.
- 6) Prioritas infrastruktur di tingkat KSM.
- 7) Kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
- 8) Swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang swadaya.
- 9) Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungkannya.
- 10) Bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan.
- 11) Pembentukan KSM.

b. Pada Tahap perencanaan diukur dengan sembilan variabel, yaitu :

- 1) Melakukan pengukuran lapangan.
- 2) Pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator.

- 3) Dokumentasi pengukuran.
- 4) Pemrosesan hasil pengukuran.
- 5) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB.
- 6) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- 7) Survey bahan yang dilakukan oleh KSM.
- 8) Pengumpulan bentuk swadaya masyarakat.
- 9) Penyusunan poposal KSM.
- c. Pada Tahap Pelaksanaan diukur dengan lima belas variable :
 - 1) 80 % masyarakat ikut berswadaya.
 - 2) KSM mengatur swadaya yang terkumpul.
 - 3) Pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan.
 - 4) Tenaga yang bekerja berasal dari luar lingkungan KSM.
 - 5) KSM menyewa peralatan berat.
 - 6) 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja.
 - 7) Pengawasan secara langsung.
 - 8) Respon Tim pelaksana.
 - 9) Monitoring oleh BKM.
 - 10) Peran serta fasilitator.
 - 11) Musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat.
 - 12) Laporan pertanggungjawaban KSM.
 - 13) Hasil pembangunan infrastruktur.
 - 14) Swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan.
 - 15) Swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.

Untuk mengetahui secara rinci pencapaian skor dan kriteria dari masing-masing variable, dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5 Rata-rata Skor masing-masing variabel Tingkat swadaya masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP Di kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

No	Variabel	Rata-rata Skor Tercapai	Kategori
A	Fase Persiapan		
	1. Pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya	4,30	Tinggi
	2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.	4,38	Tinggi
	3. Sosialisasi swadaya oleh Fasilitator.	4,15	Tinggi
	4. Masyarakat mengenal permasalahan dilingku ngannya sendiri	4,10	Tinggi
	5. Perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masya rakat.	4,08	Tinggi
	6. Prioritas infrastruktur.	4,35	Tinggi

	7. Kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.	4,35	Tinggi
	8. Swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang.	4,35	Tinggi
	9. Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya.	4,12	Tinggi
	10. Bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan.	3,58	Tinggi
	11. Pembentukan KSM	4,20	Tinggi
	Rata-rata skor tahap Persiapan	4,18	Tinggi
B	Fase Perencanaan		
	1. Melakukan pengukuran lapangan.	4,35	Tinggi
	2. Pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator.	4,23	Tinggi
	3. Dokumentasi pengukuran.		
	4. Pemrosesan hasil pengukuran	4,15	Tinggi
	5. Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB	3,90	Tinggi
		4,00	Tinggi
	6. Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur	4,08	Tinggi
	7. Survey KSM,		
	8. Pengumpulan bentuk swadaya masyarakat	4,25	Tinggi
	9. Penyusunan poposal KSM	4,56	Tinggi
	Rata-rata skor tahap perencanaan	4,28	Tinggi
		4,20	Tinggi
C	Fase Pelaksanaan		
	1. 80 % masyarakat ikut berswadaya,		
	2. KSM mengatur swadaya yang terkumpul	3,95	Tinggi
	3. Pembelajaan material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan,	4,03	Tinggi
		4,06	Tinggi
	4. Tenaga pekerja dari luar,		
	5. KSM menyewa peralatan berat	4,03	Tinggi
	6. 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja,	4,05	Tinggi
	7. pengawasan secara langsung	3,61	Tinggi
	8. Respon Tim pelaksana,	4,28	Tinggi
	9. Monitoring oleh BKM,	4,18	Tinggi
	10. Peran serta fasilitator,	4,25	Tinggi
	11. Musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat,	4,16	Tinggi
		4,31	Tinggi
	12. Laporan pertanggungjawaban KSM,		
	13. Hasil pembangunan infrastruktur,	4,03	Tinggi
	14. Swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan,	4,27	Tinggi
		3,98	Tinggi
	15. Swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan Melakukan pengukuran lapangan	4,06	Tinggi
	Rata-rata Skor tahap Pelaksanaan	4,08	Tinggi
	Rata-rata Total Skor	4,15	Tinggi

Skor rata-rata tahap persiapan sebesar 4,18, tahap perencanaan sebesar 4,20, dan tahap pelaksanaan sebesar 4,08. Karena skor total rata-rata tingkat swadaya masyarakat mencapai 4,15, nilai ini termasuk dalam kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat peduli

terhadap keberadaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan swadaya masyarakat dalam Program PNPM-MP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan masing-masing variabel tingkat swadaya masyarakat.

a. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan sosialisasi swadaya masyarakat

dalam pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP.

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,30 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya memperoleh respon tinggi.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,38 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat memperoleh respon tinggi.
- 3) Sosialisasi swadaya oleh Fasilitator.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,15 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi swadaya oleh Fasilitator memperoleh respon tinggi.
- 4) Masyarakat mengenal permasalahan dilingkungannya sendiri
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,10 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengenal permasalahan dilingkungannya sendiri memperoleh respon tinggi.
- 5) Perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,08 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat memperoleh respon tinggi.
- 6) Prioritas infrastruktur.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,35 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan prioritas infrastruktur memperoleh respon tinggi.
- 7) Kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,35 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur memperoleh respon tinggi.
- 8) Swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,35 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan swadaya dalam bentuk tenaga kerja, bahan, dan uang memperoleh respon tinggi.
- 9) Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,12 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya memperoleh respon tinggi.
- 10) Bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 3,58 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian

tanah untuk pembangunan jalan memperoleh respon tinggi

11) Pembentukan KSM

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,20 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pembentukan KSM memperoleh respon tinggi.

b. Tahap Perencanaan

1) Melakukan pengukuran lapangan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,35 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan melakukan pengukuran lapangan memperoleh respon tinggi.

2) Pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,23 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator memperoleh respon tinggi.

3) Dokumentasi pengukuran.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,15 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan dokumentasi pengukuran memperoleh respon tinggi.

4) Pemrosesan hasil pengukuran

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 3,90 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pemrosesan hasil pengukuran memperoleh respon tinggi.

5) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,00 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti

swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB memperoleh respon tinggi.

6) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,08 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur memperoleh respon tinggi.

7) Survey KSM

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,25 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan survey KSM memperoleh respon tinggi.

8) Pengumpulan bentuk swadaya masyarakat

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,56 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pengumpulan bentuk swadaya masyarakat memperoleh respon tinggi.

9) Penyusunan poposal KSM

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,28 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan penyusunan poposal KSM memperoleh respon tinggi.

c. Tahap Pelaksanaan

1) 80 % masyarakat ikut berswadaya

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 3,95 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan 80 % masyarakat ikut

- berswadaya memperoleh respon tinggi.
- 2) KSM mengatur swadaya yang terkumpul
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,03 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan KSM mengatur swadaya yang terkumpul memperoleh respon tinggi.
 - 3) Pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,06 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan memperoleh respon tinggi.
 - 4) Tenaga pekerja dari luar
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,03 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan tenaga pekerja dari luar memperoleh respon tinggi.
 - 5) KSM menyewa peralatan berat
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,05 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan KSM menyewa peralatan berat memperoleh respon tinggi.
 - 6) 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 3,61 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja memperoleh respon tinggi.
 - 7) Pengawasan secara langsung
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,28 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pengawasan secara langsung memperoleh respon tinggi.
 - 8) Respon Tim pelaksana
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,18 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan respon Tim pelaksana memperoleh respon tinggi.
 - 9) Monitoring oleh BKM
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,25 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan monitoring oleh BKM memperoleh respon tinggi.
 - 10) Peran serta fasilitator
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,16 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan Peran serta fasilitator memperoleh respon tinggi.
 - 11) Musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,31 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat memperoleh respon tinggi.
 - 12) Laporan pertanggungjawaban KSM
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,03 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan laporan pertanggungjawaban KSM memperoleh respon tinggi.
 - 13) Hasil pembangunan infrastruktur
Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,27 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan hasil pembangunan infrastruktur memperoleh respon tinggi.

ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan hasil pembangunan infrastruktur memperoleh respon tinggi.

- 14) Swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 3,98 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan memperoleh respon tinggi.

- 15) Swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan Melakukan pengukuran lapangan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan rata-rata nilai skor yang dicapai adalah 4,06 dan termasuk kategori tinggi (tabel 4.2), yang berarti swadaya masyarakat pada kegiatan ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan Melakukan pengukuran lapangan memperoleh respon tinggi.

Pembahasan

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Ada dua syarat penting yang berlaku bagi sebuah kuisioner (angket),

yaitu keharusan sebuah kuisioner bersifat valid dan reliabel. Suatu kuisioner dikatakan valid atau sah, jika pertanyaan pada suatu kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut, sedangkan suatu kuisioner dikatakan reliabel atau andal, jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran validitas kuisioner penelitian dilakukan terhadap semua butir-butir pertanyaan mengenai : Pengaruh swadaya masyarakat pada tahap persiapan pembangunan infra struktur jalan pada program PNPM-MP, Pengaruh swadaya masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP, Pengaruh swadaya masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan infra struktur jalan pada program PNPM-MP. Dalam penelitian ini, kevalidan kuisioner diukur pada tingkat signifikansi (α) 5 %, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Santoso, 2000) :

- 1) Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
- 2) Jika r hasil negatif, dan atau r hasil < r tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Kuisioner

Variabel	r-hitung	r-tabel	Keterangan
A. Fase Persiapan			
1. Pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya	0,378	0,21439	Valid
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.	0,238	0,21439	Valid
3. Sosialisasi swadaya oleh Fasilitator.	0,406	0,21439	Valid
4. Masyarakat mengenal permasalahan dilingkungannya sendiri	0,485	0,21439	Valid
5. Perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat.	0,404	0,21439	Valid
6. Prioritas infrastruktur.	0,588	0,21439	Valid
7. Kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.	0,468	0,21439	Valid
8. Swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang.	0,454	0,21439	Valid
9. Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya.	0,432	0,21439	Valid
10. Bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan.	0,632	0,21439	Valid
11. Pembentukan KSM	0,294	0,21439	Valid
B. Fase Perencanaan			

1. Melakukan pengukuran lapangan.	0,573	0,21439	Valid
2. Pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator.	0,399	0,21439	Valid
3. Dokumentasi pengukuran.	0,547	0,21439	Valid
4. Pemrosesan hasil pengukuran	0,430	0,21439	Valid
5. Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB	0,466	0,21439	Valid
6. Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur	0,563	0,21439	Valid
7. Survey KSM,	0,524	0,21439	Valid
8. Pengumpulan bentuk swadaya masyarakat	0,451	0,21439	Valid
9. Penyusunan poposal KSM	0,378	0,21439	Valid
C. Fase Pelaksanaan			
1. 80 % masyarakat ikut berswadaya,	0,565	0,21439	Valid
2. KSM mengatur swadaya yang terkumpul	0,573	0,21439	Valid
3. Pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan,	0,687	0,21439	Valid
4. Tenaga pekerja dari luar,	0,223	0,21439	Valid
5. KSM menyewa peralatan berat	0,268	0,21439	Valid
6. 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja,	0,471	0,21439	Valid
7. pengawasan secara langsung	0,314	0,21439	Valid
8. Respon Tim pelaksana,	0,332	0,21439	Valid
9. Monitoring oleh BKM,	0,547	0,21439	Valid
10. Peran serta fasilitator,	0,470	0,21439	Valid
11. Musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat,	0,377	0,21439	Valid
12. Laporan pertanggungjawaban KSM,	0,576	0,21439	Valid
13. Hasil pembangunan infrastruktur,	0,329	0,21439	Valid
14. Swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan,	0,217	0,21439	Valid
15. Swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan Melakukan pengukuran lapangan	0,507	0,21439	Valid
Alpha Variabel	0,737	0,21439	Reliabel

Menentukan nilai r tabel digunakan kriteria: taraf signifikan (α) sebesar 0,05 Derajat kebebasan = $n-2$ (n = jumlah sample). Dari taraf signifikan (α) sebesar 0,05, dan derajat kebebasan = 58 maka diperoleh t tabel sebesar 0,21439 (lihat lampiran 6 hal 157).

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa semua butir pertanyaan mengenai pengaruh swadaya masyarakat pada tiap tahap terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP dari ketiga variable adalah valid atau sah, karena r hasil lebih besar dari pada r tabel (0,21439). Serta semua butir pertanyaan mengenai variabel tersebut adalah reliabel, karena nilai r Alpha (0,737) lebih besar dari r tabel (0,21439).

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan masing-masing variabel tingkat swadaya masyarakat.

a. Tahap Persiapan

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya
 Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,378 lebih besar dari r tabel (0,21439)

sehingga soal no.1 dalam tahap persiapan yaitu tentang pengetahuan masyarakat tentang PNPM-MP di lingkungannya adalah valid atau sah.

- 2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.

Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,238 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.2 dalam tahap persiapan yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat adalah valid atau sah.

- 3) Sosialisasi swadaya oleh Fasilitator.

Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,406 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.3 dalam tahap persiapan yaitu tentang sosialisasi swadaya oleh Fasilitator adalah valid atau sah.

- 4) Masyarakat mengenal permasalahan di lingkungannya sendiri

Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,485 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.4 dalam tahap

- persiapan yaitu tentang masyarakat mengenal permasalahan dilingkungannya sendiri adalah valid atau sah.
- 5) Perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,404 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.5 dalam tahap persiapan yaitu tentang perencanaan kegiatan infrastruktur oleh masyarakat adalah valid atau sah.
 - 6) Prioritas infrastruktur.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,588 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.26 dalam tahap persiapan yaitu tentang prioritas infrastruktur adalah valid atau sah.
 - 7) Kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,468 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.7 dalam tahap persiapan yaitu tentang kesadaran akan perlunya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah valid atau sah.
 - 8) Swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,454 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.8 dalam tahap persiapan yaitu tentang swadaya tenaga kerja, bahan, dan uang adalah valid atau sah.
 - 9) Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,432 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.9 dalam tahap persiapan yaitu tentang Musyawarah masyarakat terkait permasalahan infrastruktur dilingkungannya adalah valid atau sah.
 - 10) Bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,632 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.10 dalam tahap persiapan yaitu tentang bentuk swadaya masyarakat merelakan sebagian tanah untuk pembangunan jalan adalah valid atau sah.
 - 11) Pembentukan KSM
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,294 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.11 dalam tahap persiapan yaitu tentang Pembentukan KSM adalah valid atau sah.
- b. Tahap Perencanaan
 - 1) Melakukan pengukuran lapangan.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,573 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.1 dalam tahap perencanaan yaitu tentang melakukan pengukuran lapangan adalah valid atau sah.
 - 2) Pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,399 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.2 dalam tahap perencanaan yaitu tentang pengukuran jalan oleh masyarakat, BKM, dan fasilitator adalah valid atau sah.
 - 3) Dokumentasi pengukuran.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,547 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.3 dalam tahap perencanaan yaitu tentang dokumentasi pengukuran adalah valid atau sah.
 - 4) Pemrosesan hasil pengukuran
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,430 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.4 dalam tahap perencanaan yaitu tentang pemrosesan hasil pengukuran adalah valid atau sah.
 - 5) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,466 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.5 dalam tahap perencanaan yaitu tentang Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara menghitung volume RAB adalah valid atau sah.
 - 6) Pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,563 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.6 dalam tahap perencanaan yaitu tentang pembekalan masyarakat dengan pelatihan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah valid atau sah.
 - 7) Survey KSM
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,524 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.7 dalam tahap perencanaan yaitu tentang survey KSM adalah valid atau sah.
 - 8) Pengumpulan bentuk swadaya masyarakat

- Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,451 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.8 dalam tahap perencanaan yaitu tentang pengumpulan bentuk swadaya masyarakat adalah valid atau sah.
- 9) Penyusunan poposal KSM
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,378 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.9 dalam tahap perencanaan yaitu tentang penyusunan poposal KSM adalah valid atau sah.
- c. Tahap Pelaksanaan
- 1) 80 % masyarakat ikut berswadaya
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,585 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.1 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang 80 % masyarakat ikut berswadaya adalah valid atau sah.
- 2) KSM mengatur swadaya yang terkumpul
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,573 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.2 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang KSM mengatur swadaya yang terkumpul adalah valid atau sah.
- 3) Pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,687 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.3 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang pembelajaran material berdasarkan hasil survey tahap perencanaan adalah valid atau sah.
- 4) Tenaga pekerja dari luar
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,223 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.4 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang Tenaga pekerja dari luar adalah valid atau sah.
- 5) KSM menyewa peralatan berat
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,268 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.5 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang KSM menyewa peralatan berat adalah valid atau sah.
- 6) 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,471 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.6 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang 70 % warga ikut menjadi tenaga kerja adalah valid atau sah.
- 7) Pengawasan secara langsung
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,314 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.7 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang pengawasan secara langsung adalah valid atau sah.
- 8) Respon Tim pelaksana
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,332 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.8 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang respon tim pelaksana adalah valid atau sah.
- 9) Monitoring oleh BKM
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,547 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.9 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang monitoring oleh BKM adalah valid atau sah.
- 10) Peran serta fasilitator
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,470 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.10 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang peran serta fasilitator adalah valid atau sah.
- 11) Musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,377 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.11 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang musyawarah pertanggungjawaban KSM kepada masyarakat adalah valid atau sah.
- 12) Laporan pertanggungjawaban KSM
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,576 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.12 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang laporan pertanggungjawaban KSM adalah valid atau sah.
- 13) Hasil pembangunan infrastruktur
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,329 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.13 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang hasil pembangunan infrastruktur adalah valid atau sah.
- 14) Swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,217 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.14 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang swadaya yang dilaksanakan lebih besar daripada perencanaan adalah valid atau sah.
- 15) Swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan
Melakukan pengukuran lapangan.
Dari hasil perhitungan diperoleh r hitung 0,507 lebih besar dari r tabel (0,21439) sehingga soal no.15 dalam tahap pelaksanaan yaitu tentang swadaya masyarakat dalam pemeliharaan

infrastruktur jalan melakukan pengukuran lapangan adalah valid atau sah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Variabel-variabel swadaya masyarakat yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP semuanya tergolong tinggi atau berpengaruh dengan rincian sebagai berikut :

1. Variabel tahap persiapan tergolong kriteria tinggi atau berpengaruh dengan skor rata-rata sebesar 4,18.
2. Variabel tahap perencanaan tergolong kriteria tinggi atau berpengaruh dengan skor rata-rata sebesar 4,20.
3. Variabel tahap pelaksanaan tergolong kriteria tinggi atau berpengaruh dengan skor rata-rata sebesar 4,08.
4. Variabel-variabel swadaya masyarakat dalam tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan secara serentak atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan pada program PNPM-MP

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Zainul Arifin. 2007. *Perananan Dan Jenis Penelitian Dan Metode Ilmiah*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar.UMB.
- Anonymous, 2009. *Metode Sampling*. <http://cuplis.net/2009/04/metode-sampling>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2009.
- Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* JAIP, Vol. 35 no 4.
- Beebe, James. 1995. "Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal". *Human Organization*, vol. 54, No. 1, Spring.
- Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Sosial : Format format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Choguill, Marisa B. Guaraldo (1996); 'A Ladder of Community Participation for Underdeveloped Countries', *Habitat International*, Vol. 20, No. 3.
- Departemen Pekerjaan Umum. September 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik*

- Jalan Antar Kota*. Jakarta : Badan Penerbit Pekerjaan Umum
- Departemen Pekerjaan Umum – *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Juli 2009. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum.
- Djoko Untung Soedarsono. 1979. *Konstruksi Jalan Raya*. Jakarta : Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
- Dwi, 14 Februari 2008. *PRA Sebagai Metode Pelaksanaan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.Yogyakarta. Divisi Consulting CV.Karya Mandiri Sejahtera.
- Gay, L.R. 1991. *Educational Evaluation and Measurement: Com-petencies for Analysis and Application*. Second edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur. Surabaya, 14 Maret 1997.
- Khan, A.M. dan Krisnawati Suryanata. 1994. *A Review of Participatory Reseach Techniques for National Resources Management*. The Ford Foundation: Southeast Asia Regional Office. Jakarta.
- Levin, Richard & Rubin, David. 1998. *Statistics For Managements*, Prentice Hall International Inc.
- Santoso, S, 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Singarimbun, Sofian Effendi, 1997, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES.
- Sudjana. 1989. *Metoda Statistika*. Bandung: Penerbit Transito.
- Sumodiningrat, G, 1997, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, PT.Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Waluyo, Joko. 2008. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Terhadap Keberhasilan Pembangunan Pedesaan*. Tesis, Program Pasca Sarjana Teknik Sipil. Unissula. Semarang.
- Wibisono, Gunawan 1989, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan Pasar, Tesis, Program Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. ITB. Bandung.